

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
TINGKAT PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DAN KOTA
DI PROVINSI SUMATERA SELATAN**

SKRIPSI



Nama : Febby Anjelina

NIM : 222018167

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

2022

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
TINGKAT PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DAN KOTA
DI PROVINSI SUMATERA SELATAN**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Akuntansi
Pada Program Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Palembang**



Nama : Febby Anjelina

NIM : 222018167

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

2022

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Febby Anjelina
Nim : 222018167
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik
Judul : Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat
Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada
Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan.

Dengan ini saya menyatakan :

1. Karya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik sarjana strata 1 baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan. Rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan bimbingan.
3. Dalam karya tulis ini terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya ini serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Palembang,



Febby Anjelina

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Palembang

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat
Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
Nama : Febby Anjelina
Nim : 222018167
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Mata Kuliah Pokok : Akuntansi Sektor Publik

Diterima dan Disahkan
Pada Tanggal, Maret 2022

Pembimbing I



Dr. Drs Sunardi, S.E., M.Si
NIDN: 020604603

Pembimbing II



Welty, S.E., M.Si
NIDN: 02121228108

Mengetahui
Dekan
Ketua Program Studi Akuntansi



Dr. Betri, S.E., M.Si., Ak., CA
NIDN: 0216106902

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

“Jika gagal jangan ubah tujuannya tapi ubahlah langkahnya, maka akan mendapatkan apa yang kita inginkan”

Terucap syukur kepada Allah SWT

Kupersembahkan Skripsi ini kepada :

- Kedua orang tuaku yang senantiasa Memberikan doa dan dukungan
- Kakak dan keluarga besarku
- Pembimbing Skripsi
- Teman-teman seperjuangan



PRAKATA

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah Rabbil'Alaamin, dengan memanjatkan puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang selalu melindungi, mencurahkan rahmat, dan hidayahNya sehingga penyusunan skripsi yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan” skripsi ini disusun sebagai syarat menyelesaikan jenjang Strata Satu (S1) guna meraih gelar Sarjana Akuntansi di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Ucapan terima kasih yang pertama penulis sampaikan kepada Allah SWT, kemudian kepada kedua orang tua Ayahanda saya Abdul Wahid dan ibunda saya Suhartini, serta keluarga yang telah mendoakan dan memotivasi saya dalam proses penyusunan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Drs.Dr.Sunardi,S.E.,M.Si dan Ibu Welly,S.E.,M.Si yang dengan penuh kesabaran dan ketelitian telah membimbing dan memberikan masukan guna penyelesaian skripsi ini. Selain itu ucapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E.,M.M. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Yudha Mahrom, S.E., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Dr. Betri,S.E.,M.Si.,Ak.,CA dan Ibu Nina Sabrina,S.E.,M.Si Selaku

ketua dan Sekretaris Program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.

4. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Pengajar program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Sumatera Selatan yang telah memberikan izin penelitian untuk keperluan skripsi penulis.
6. Teman yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah membantu dan memberikan semangat sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

Akhirul kalam saya mengucapkan terimakasih banyak kepada semua pihak yang membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga Allah SWT membalas baik budi kalian.

Palembang, Maret 2022
Penulis,

Febby Anjelina

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	iii
HALAMAN TANDA PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
MOTO DAN PERSEMBAHAN	v
PRAKATA	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
ABSTRAK	xv
ABSTRACT.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PIKIR, DAN HIPOTESIS	
A. Kajian Pustaka	12
1. Landasan Teori	12
a. Pemerintah Daerah	12

b. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	13
c. Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.....	14
d. Faktor -Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	16
B. Kerangka Pemikiran.....	25
C. Hipotesis	30

BAB III METODOLOGI PENEITIAN

A. Jenis Penelitian	31
B. Lokasi Penelitian	32
C. Operasionalisasi Variabel	32
D. Populsi dan Sampel	33
E. Data yang Diperlukan	34
F. Metode Pengumpulan Data	36
G. Pengujian Data	37
H. Teknik Analisis	37
1. Ukuran Statistik Deskriptif	37
2. Analisis Statistik Inferennsial	38
a. Uji Asumsi Klasik	38
1) Uji Normalitas	38
2) Uji Multikolinearitas	39
3) Heteroksedastisitas	39
b. Uji Regresi Linier Berganda	40

1) Rancangan Uji Koefisien Determinasi	40
2) Rancangan Uji Hipotesis	41

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	43
1. Gambaran Singkat Tentang Kabupaten dan Kota Di Provinsi Sumatera Selatan	43
2. Analisis Statistik Deskriptif Variabel	44
a. Variabel Tingkat Ketergantungan (X1)	44
b. Variabel Tingkat Kekayaan pemerintah Daerah (X2)	47
c. Variabel Umur Pemerintah Daerah (X3)	49
d. Variabel Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)	51
3. Hasil Pengolahan Data	54
a. Uji Statistik Deskriptif	54
b. Analisis Statistik Inferensial	55
1) Uji Asumsi Klasik	55
a) Uji Normalitas	55
b) Uji Multikolinearitas	56
c) Uji Heterokedastisitas	58
2) Uji Regresi Linier Berganda	59
a) Uji Koefisien Determinasi	60
b) Uji Hipotesis Secara Bersama-sama (Uji F)	61
c) Uji Hipotesis Secara Parsial (Uji t)	62

B. Pembahasan Hasil Penelitian	64
1. Hasil Uji Pengaruh Tingkat Ketergantungan, Tingkat Kekayaan Pemerintah Daerah dan Umur Pemerintah Daerah terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	64
2. Hasil Uji Pengaruh Tingkat Ketergantungan Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	65
3. Hasil Uji Pengaruh Tingkat Kekayaan Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	68
4. Hasil Uji Pengaruh Umur Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	70

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

A. simpulan	74
B. Saran	74

DAFTAR PUSTAKA76

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Ringkasan Pengungkapan Laporan Keuangan	7
Tabel II.1	Persamaan dan Perbedaan Penelitian dengan Penelitian Sebelumnya	26
Tabel III.1	Operasionalisasi Variabel	31
Tabel III.2	Jumlah Sampel Provinsi Sumatera Selatan	32
Tabel III.3	Jadwal Penelitian	41
Tabel IV.1	Hasil Data Pengelolaan Tingkat Ketergantungan	42
Tabel IV.2	Hasil Pengolahan Data Tingkat Kekayaan Pemerintah	44
Tabel IV.3	Data Umur Pemerintah	48
Tabel IV.4	Hasil Pengolahan Data Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	50
Tabel IV.5	Uji Normalitas	50
Tabel IV.6	Uji Multikolinearitas	54
Tabel IV.7	Uji Regresi Linear Berganda	57
Tabel IV.8	Uji Koefisien Determinasi (R Square)	58
Tabel IV.9	Hipotesis Uji F	59
Tabel IV.10	Hipotesis Uji t	60

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1	Kerangka Pemikiran	29
Gambar IV.1	Peta Provinsi Sumatera Selatan	42
Gambar IV.2	Uji Heteroskedastisitas dengan Scatterplot	56

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Hasil Olah Data
- Lampiran 2 Tabel Statistik
- Lampiran 3 Hasil Output SPSS
- Lampiran 4 Kartu Aktivitas Bimbingan Skripsi
- Lampiran 5 Fotocopy Surat Keterangan Riset dari Tempat Penelitian
- Lampiran 6 Fotocopy Sertifikat Membaca dan Menghafal Al-Qur'an
- Lampiran 7 Fotocopy Sertifikat SPSS
- Lampiran 8 Fotocopy Sertifikat yang Dimiliki
- Lampiran 9 Fotocopy Plagiarisme
- Lampiran 10 Biodata Penulis

ABSTRAK

Febby Anjelina/222018167/2022/Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pengaruh tingkat ketergantungan, tingkat kekayaan pemerintah daerah dan umur pemerintah daerah terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penelitian ini adalah bagaimanakah pengaruh tingkat ketergantungan, tingkat kekayaan pemerintah daerah dan umur pemerintah daerah terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. Penelitian ini termasuk penelitian asosiatif. Populasi dan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 17 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan selama 3 tahun (2017-2019). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2017-2019. Metode pengumpulan data yang digunakan analisis dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Secara bersama-sama tingkat ketergantungan, tingkat kekayaan pemerintah daerah dan umur pemerintah daerah berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Secara parsial atau individual umur pemerintah daerah berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan tingkat ketergantungan tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah, dan tingkat kekayaan pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah.

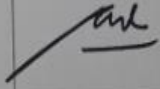
Kata kunci : tingkat ketergantungan, tingkat kekayaan pemerintah daerah, umur pemerintah daerah, tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah.

ABSTRACT

Febby Anjelina/222018167/2022/Analysis of Factors Affecting the Level of Disclosure of Government Financial Statements in Regencies/Cities in South Sumatra Province.

The formulation of the problem in this study is how the influence of the level of dependence, the level of wealth of the local government and the age of the local government on the level of disclosure of local government financial statements in the Regency / City in South Sumatra Province. This study aims to determine the effect of this study is how the influence of the level of dependence, the level of wealth of the local government and the age of the local government on the level of disclosure of the financial statements of the district/city government in South Sumatra Province. This research includes associative research. The population and samples used in this study were 17 districts/cities in South Sumatra Province for 3 years (2017-2019). The data used in this research is secondary data in the form of data on the results of the 2017-2019 Regional Government Financial Report Examination. The data collection method used was documentation analysis. The results of this study indicate that together the level of dependence, the level of local government wealth and the age of the local government have a significant effect on the level of disclosure of local government financial statements. Partially or individually the age of the local government has a significant effect on the level of disclosure of local government financial statements, while the level of dependence has no effect on the level of disclosure of local government financial statements, and the level of local government wealth has no effect on the level of disclosure of local government financial statements.

Keywords: level of dependence, level of local government wealth, age of local government, level of disclosure of local government financial statements.

NO	NAMA	NIM	KETERANGAN
	Febby Anjelina	222018167	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah daerah selaku pihak yang bertugas untuk melakukan upaya dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan melalui penyajian laporan keuangan pemerintah daerah berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan. Transparansi menjadi alat yang penting bagi masyarakat untuk memantau dan mengevaluasi kinerja wakil rakyat dan pegawai pemerintah baik pusat maupun daerah. Konsep pedoman kebijakan pemerintahan menyatakan bahwa transparansi mengandung unsur pengungkapan dan penyediaan informasi yang memadai dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan. Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Pasal 1 poin 15 dinyatakan bahwa pengungkapan merupakan laporan keuangan yang menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus mengungkapkan berbagai informasi dalam laporan keuangan sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi keuangan publik

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang rumusannya, Pemerintah daerah adalah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Dapat disimpulkan, bahwa pemerintah daerah merupakan pemerintahan di daerah yang berkaitan dengan kewenangan yang dimiliki dalam mengurus dan mengatur rumah tangganya sesuai dengan otonomi daerah yang berkaitan dengan pembagian

kekuasaan dalam penyelenggara pemerintahan di daerah yang meliputi kepala daerah adalah gubernur (kepala daerah provinsi), bupati (kepala daerah kabupaten), atau wali kota (kepala daerah kota).

Beberapa faktor yang digunakan untuk melihat tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah, seperti dalam penelitian ini menggunakan tiga komponen variabel yaitu, tingkat ketergantungan, tingkat kekayaan pemerintah daerah, dan umur pemerintah daerah.

Puspita (2016:3) berpendapat bahwa tingkat ketergantungan berhubungan dengan tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah, tingkat ketergantungan daerah yang tinggi mendorong pemerintah daerah untuk mengungkapkan informasi yang lebih banyak pada LKPD sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap sumber dana yang di transfer pemerintah pusat. DAU digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah sehingga dapat terlaksana pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah akan memantau pelaksanaan dari alokasi DAU sehingga hal ini memotivasi pemda untuk berkinerja lebih baik. Tingkat ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat akan cenderung membuat pemerintah daerah lebih menaati peraturan yang berlaku, karena dengan tingkat ketergantungan pemerintah daerah ke pemerintah pusat yang semakin besar membuat pemerintah daerah lebih berhati hati dalam melaksanakan penatausahaan keuangan. Sehingga LKPD tersaji sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Henny (2017:57) berpendapat bahwa kekayaan pemerintah daerah sangat berhubungan dengan meningkatnya pengungkapan laporan keuangan

karena memberikan sinyal dari kualitas pemerintah daerah, dimana pemerintah daerah dapat mengambil manfaat dengan meningkatkan kesempatan mereka dipilih Kembali dan mengurangi biaya kepentingan.

Menurut Gina (2017) Pemerintah yang lebih tua akan lebih paham dengan peraturan dan standar-standar yang berkaitan dengan pengungkapan laporan keuangan. Hal tersebut disebabkan karena laporan keuangan pada tahun sebelumnya telah diperiksa dan hasilnya dievaluasi untuk dapat ditindaklanjuti untuk memperbaiki sebagai pedoman pengungkapan laporan keuangan pada tahun anggaran berikutnya.

Laporan keuangan merupakan salah satu informasi wajib di publikasikan sebagai sarana pertanggungjawaban pihak manajemen terhadap pengelolaan sumber daya pemilik, serta jendela informasi yang memungkinkan bagi pihak-pihak diluar manajemen, mengetahui kondisi entitas. Dalam pengelolaan keuangan, pemerintah diminta untuk menyajikan Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah (LKPD) yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah diterima secara umum.

Laporan keuangan pemerintah daerah memiliki tujuan untuk menyajikan informasi yang berkaitan dengan posisi keuangan, realisasi anggaran, dan kinerja keuangan yang akan berguna bagi pemerintah daerah guna menyusun dan mengevaluasi kebijakan dalam mengelola sumber dana.

Pengungkapan merupakan bagian integral dari pelaporan keuangan. Secara teknis, pengungkapan merupakan langkah akhir dalam proses akuntansi yaitu penyajian informasi dalam bentuk seperangkat penuh laporan keuangan.

Pengungkapan laporan keuangan dalam arti luas berarti penyampaian (*release*) informasi. Sedangkan menurut para akuntan pengungkapan laporan keuangan adalah penyampaian informasi keuangan di dalam laporan keuangan yang biasanya laporan tahunan.

Secara umum menurut Suhardjanto dan Yulianingtyas (2016), pengungkapan adalah menyajikan informasi yang dipandang perlu untuk mencapai tujuan pelaporan keuangan dan untuk melayani berbagai pihak yang mempunyai kepentingan berbeda-beda. Pengungkapan harus dapat memberikan informasi yang material dan relevan agar dapat digunakan dalam pengambilan keputusan.

Penelitian terkait yang dilakukan oleh Dadan (2016) dengan judul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan, tingkat kekayaan pemerintah daerah masing-masing berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian selanjutnya, dilakukan oleh, Putri (2017) dengan judul Analisis Faktor-Faktor Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hasil dari penelitiannya menunjukkan tingkat ketergantungan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian Selanjutnya dilakukan oleh Meri dan Elfitri (2019) dengan judul Faktor-Faktor yang mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan

Keuangan Pemerintah Daerah pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat. Dengan hasil penelitian menunjukkan tingkat ketergantungan, umur pemerintah daerah, tingkat kekayaan pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah.

Selanjutnya penelitian dilakukan oleh Winda dan Fefri (2019) dengan judul Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hasil penelitian menunjukkan umur pemerintah tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah, dengan tingkat kekayaan pemerintah daerah berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh (Fatwa, 2019) dengan judul penelitian, Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2017, dengan hasil penelitian tidak ada pengaruh yang ditimbulkan oleh besar kecilnya tingkat kekayaan pemerintahan terhadap pengungkapan informasi pada LKPD, salah satu faktor yang memengaruhi tingkat pengungkapan LKPD adalah tingkat ketergantungan. Hasil tersebut selaras dengan hipotesisnya dalam penelitian yaitu tingkat pengungkapan LKPD berkorelasi positif serta dipengaruhi secara signifikan oleh tingkat ketergantungan.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu, terdapat jawaban-jawaban yang tidak konsisten untuk masing-masing variabel yang serupa dengan

penelitian ini. Sehingga peneliti akan menguji Kembali variabel-variabel tersebut dalam rangka memberikan jawaban atas perbedaan hasil penelitian-penelitian terdahulu.

Fenomena secara umum yang didapatkan dari berita acara yang di dipublikasikan dari *kompas.com* tentang penyelewengan dana menyangkut gubernur Sumatera Selatan, KPK mengusut adanya dugaan kasus penyelewengan APBD Sumatera Selatan. Gubernur terbukti memberikan aliran dana bantuan sosial kepada organisasi sosial dana masyarakat dari bantuan sosial dan penerimaan hibah dalam APBD sebesar Rp. 1,492 triliun.

Selanjutnya Berita acara yang di dapatkan dari *kompas.id* tentang penyelewengan anggaran infrastruktur. Satu persatu kepala daerah di Sumatera Selatan terjerat korupsi. Selain Bupati Musi Banyuasin kasus korupsi juga pernah menimpa mantan Bupati Muara Enim. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku paling besar dalam melakukan korupsi adalah dilakukan oleh kepala daerah, pejabat di lingkungan pemerintah daerah, anggota dan pimpinan parlemen daerah.

Penelitian ini penting dilakukan selain sebagai bentuk evaluasi atas tingkat pengungkapan yang dilakukan pemerintah daerah, namun juga dapat digunakan untuk menemukan bukti terkait hal-hal yang dapat memotivasi pemerintah daerah dalam pengungkapan laporan keuangan.

Berikut daftar pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten dan kota Provinsi Sumatera Selatan :

Tabel I.1
Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2017-2019

No	Kabupaten atau Kota	Tahun	Tingkat Ketertgantungan (DAU)	Tingkat Kekayaan Pemerintah Daerah (PAD)	Umur Pemerintah Daerah	Tingkat Pengungkapan LKPD
1	Kab. Banyuasin	2017	923.771.804.000,00	125.984.368.887,92	15	0,36
		2018	933.631.693.000,00	140.602.072.489,75	16	0,97
		2019	979.541.981.000,00	200.616.348.310,39	17	1,00
2	Kab. Empat Lawang	2017	415.913.762.000,00	68.806.714.653,58	10	0,66
		2018	424.811.343.000,00	32.217.492.488,71	11	0,79
		2019	442.984.149.000,00	41.672.141.481,16	12	1,00
3	Kab. Lahat	2017	694.390.958.000,00	164.495.177.551,81	29	0,61
		2018	696.379.856.000,00	112.571.296.475,37	30	0,58
		2019	723.556.689.000,00	141.161.144.249,35	31	0,60
4	Kab. Muara Enim	2017	661.337.068.000,00	226.929.233.264,54	58	1,00
		2018	661.337.068.000,00	232.468.708.584,45	59	1,00
		2019	686.250.571.000,00	303.296.321.151,66	60	1,00
5	Kab. Musi Banyuasin	2017	344.295.499.000,00	209.410.035.753,13	58	0,49
		2018	370.826.979.000,00	210.238.037.283,96	59	0,65
		2019	397.430.383.000,00	286.594.847.515,54	60	0,64
6	Kab. Musi Rawas	2017	637.955.157.000,00	151.594.082.635,49	9	0,62
		2018	639.753.278.000,00	106.289.385.325,54	10	0,63
		2019	662.471.353.000,00	128.563.715.132,68	11	0,62
7	Kab. Musi Rawas Utara	2017	378.211.485.000,00	57.580.992.080,77	4	0,54
		2018	383.935.458.000,00	30.141.830.709,51	5	0,54
		2019	397.354.009.000,00	37.574.950.356,98	6	0,51
8	Kab. Ogan Ilir	2017	619.873.617.000,00	95.711.837.735,90	13	0,51
		2018	623.348.780.000,00	57.959.414.567,21	14	0,67
		2019	648.303.784.000,00	96.490.199.716,99	15	0,53
9	Kab. OKI	2017	1.042.870.844.000,00	222.961.997.724,44	14	0,36
		2018	1.053.840.757.000,00	235.946.143.259,17	15	0,43
		2019	1.080.762.813.000,00	195.401.652.977,59	16	0,62
10	Kab. OKU	2017	631.233.579.000,00	172.013.164.446,13	14	0,50
		2018	636.233.972.000,00	156.622.053.791,34	15	0,49
		2019	661.416.518.000,00	145.563.548.512,85	16	0,55
11	Kab. OKU Selatan	2017	585.269.591.000,00	89.506.598.777,46	13	0,13
		2018	598.063.061.000,00	42.993.134.751,66	14	0,24
		2019	622.584.708.000,00	57.669.139.990,39	15	0,24
12	Kab. OKU Timur	2017	755.658.062.000,00	77.706.784.295,93	14	0,58
		2018	767.167.031.000,00	85.235.157.420,53	15	0,48
		2019	809.984.915.000,00	99.017.727.658,01	16	0,63
13	Kab. PALI	2017	317.402.008.000,00	56.934.787.815,97	4	0,46
		2018	317.402.008.000,00	74.392.980.925,08	5	0,51
		2019	325.990.755.000,00	84.794.229.883,15	6	0,54
14	Kota Lubuklinggau	2017	444.207.307.000,00	115.521.939.795,78	16	0,62
		2018	449.062.949.000,00	165.665.915.795,70	17	0,63
		2019	483.388.400.000,00	166.689.280.993,91	18	0,61
15	Kota Pagar Alam	2017	387.411.982.000,00	65.538.892.445,17	16	0,40
		2018	391.943.478.000,00	73.600.344.354,05	17	0,41
		2019	414.504.581.000,00	60.064.187.982,36	18	0,68
16	Kota Palembang	2017	1.269.426.417.000,00	1.091.704.605.854,90	111	0,42

		2018	1.269.426.417.000,00	953.302.082.627,74	112	0,52
		2019	1.347.785.960.000,00	1.081.114.690.868,43	113	0,48
17	Kota Prabumulih	2017	412.228.943.000,00	119.192.660.726,34	16	0,69
		2018	416.312.645.000,00	90.910.521.066,19	17	0,73
		2019	440.240.422.000,00	100.975.564.957,57	18	0,76

Sumber : Badan Pemeriksa Keuangan 2021

Berdasarkan tabel diatas bisa ditemukan fenomena untuk variabel tingkat ketergantungan kabupaten dan kota di provinsi Sumatera selatan sepanjang tahun 2017 sampai 2019 seperti di kabupaten Ogan Ilir pendapatan dana alokasi umumnya cukup tinggi tetapi pengungkapan laporan keuangannya cukup rendah. Hal ini dapat menyebabkan kecurigaan kepada pemerintah dikarenakan pemerintah yang menutupi informasi keuangan dapat diduga kurang berkompeten dalam melaporkan keuangannya. Seharusnya jika tujuan utama pemerintah daerah adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meingkatkan daya saing daerah maka pemerintah harus berupaya mewujudkan keseimbangan penerimaan dana dengan mempertahankan informasi keuangannya.

Tingkat kekayaan pemerintah daerah menjadikan suatu tuntutan bagi pemerintah daerah untuk mengungkapan laporan keuangannya, semakin tinggi pendapatan daerah makan semakin tinggi tuntutan dalam tingkat pengungkapan laporan keuangan. Fenomena dalam variabel tingkat kekayaan pemerintah daerah sepanjang tahun 2017 sampai 2019 pada kabupaten dan kota di provinsi Sumatera Selatan seperti di kabupaten OKU yang memiliki pendapatan daerah yang cukup tinggi tetapi tingkat pengungkapan laporan keuangannya justru rendah berbanding terbalik dengan kabupaten Empat Lawang yang pendapatan daerahnya cukup rendah tetapi tingkat pengungkapan laporan keuangannya

cukup tinggi. Hal ini menunjukkan jika tidak semua kabupaten yang memiliki pendapatan daerah yang tinggi akan mengungkapkan laporan keuangannya.

Fenomena pada variabel umur pemerintah daerah sepanjang tahun 2017 sampai 2019 berdasarkan tabel diatas pada kabupaten Lahat yang masih tidak konsisten dalam pengungkapan laporan keuangannya. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua pemerintah daerah yang umur pemerintah daerahnya semakin lama akan konsisten terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan.

Dari beberapa uraian maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Sumatera Selatan”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini yaitu apakah faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah yaitu:

1. Apakah tingkat ketergantungan, tingkat kekayaan pemerintah daerah dan umur pemerintah daerah terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah?
2. Apakah tingkat ketergantungan berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan Laporan keuangan pemerintah daerah?
3. Apakah tingkat kekayaan pemerintah daerah berpengaruh terhadap tingkat Pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah?

4. Apakah umur pemerintah daerah berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah, maka tujuan penelitian adalah untuk Mengetahui:

1. Pengaruh tingkat ketergantungan, tingkat kekayaan pemerintah daerah, dan umur pemerintah daerah terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah.
2. Pengaruh tingkat ketergantungan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah.
3. Pengaruh tingkat kekayaan pemerintah daerah terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah.
4. Pengaruh umur pemerintah daerah terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan diatas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak diantaranya sebagai berikut :

1. Penulis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dalam menganalisis akuntabilitas instansi pemerintah. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya.

2. Pemerintahan

Penelitian ini dapat digunakan sebagai sumbang saran bagi pemerintah untuk memeperbaiki tingkat pengungkapan dalam laporan keuangan pemerintah untuk menjadi lebih baik lagi.

3. Almamater

Adanya penelitian ini diharapkan untuk menambah wawasan dan juga informasi untuk seluruh pihak Universitas Muhammadiyah Palembang, terkhusus mengenai akuntansi pemerintahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi.2016, Teori, Konsep dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik Dari Anggaran Hingga Laporan Keuangan Dari Pemerintah hingga Tempat ibadah. Jakarta : Salemba Empat
- Adiwilaga Rendy dkk. (2018). Sistem Pemerintahan Indonesia. *Sleman: Deepublish*
- Carunia Mulya Firdaus. 2017. Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam Pembangunan Nasional. Yayasan Pustaka Obor. Jakarta. 978-602
- Dadan Ramdhani. 2016. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Banten. *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu. Vol.09.No.2.* 146-160
- Dani Suluh.(2019).Definisi-Definisi dalam Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah. Diakses di <http://danisuluhpermadi.web.id/2019/10/11/langkah-langkah-menyusun-laporan-keuangan-skpd-basis-akrual/>
- Dedi Ismatullah.2017. Akuntansi Pemerintah. Cetakan CV Pustaka Setia. Bandung.
- Era Fatwa Amaliah dan Haryanto. 2019. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *E-Journal Vol.8 No.2*, 1-13.
- Firdausy, Carunia Mulya. 2017. Analisis Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah Dalam Membiayai Pembangunan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2007.

- Gina Purwadina. 2017. Pengaruh Kekayaan Daerah, Kompleksitas Pemerintahan Daerah, Umur Administratif Pemerintah Daerah, Ketergantungan Daerah Terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Thesis Skripsi*.
- Ghozali I and Chariri A. 2016. Teori Akuntansi. Universitas Diponegoro Semarang.
- Halkadri Fitra. 2019. Analisis Neraca dan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah. Cetakan Pertama. CV IRDH. Malang.
- Imam Ghozali. 2016. Desain Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif untuk Akuntansi, Bisnis dan Ilmu Sosial Lainnya. Yogyakarta.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2016. *Versi Online*
- Meri Andriani, Elfritri Santi, dan Rasyidu Mustika. 2019. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat. *Akuntansi dan Manajemem. Vol.14.No.1* 1-14
- Maulidya. 2021. Diakses di <http://repository.stei.ac.id/4978/2/BAB%20I.pdf>
- Maya Angelicca. 2019. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah
- Medynatul. 2017. Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah. *Jurnal Akuntansi. E-Journal UNP*. Padang.
- Meli Marliani. 2018. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Kompleksitas, dan Temuan Audit Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan. *E-JRA Vol.07 No.10*, 37-51.
- Nur Fadhillah Amri. 2019. Mengenal Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). *E-Akuntansi. Online Accounting Information*.
- Portal Resmi Badan Pemeriksa Keuangan, 2019. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Tahun 2017 Sampai 2019. <https://sumsel.bpk.go.id>.
- Pedoman Penulisan Usulan Penelitian dan Skripsi. 2021. Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
- Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

- Putri Puspita Ayu. 2019. Analisis Faktor-Faktor Pengungkapan laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Jawa Barat. *Vol.9.No.2* 187-198
- Romie Priyastama. 2017. Buku Sakti Kuasai SPSS Pengolahan Data dan Analisis Data . Star Up. Bantul.
- Sekaran, Uma dan Roger Bougie. 2017. Metode penelitian untuk bisnis: pendekatan pengembangan-keahlian. Jakarta: Salemba Empat.
- Sufatmawati. 2020. diakses di <http://eprints.umpo.ac.id/5715/3/BAB%20II.pdf>
- Sugiyono.2017. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. CV Alfabeta. Bandung.
- Suhardjanto dan Yulianingtyas. (2016) Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kepatuhan Pengungkapan Wajib dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi & A*